

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

AVREDO IVAN HESVIANTO

C100170090

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AVREDO IVAN HESVIANTO
C100170090

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M' with a stylized flourish.

Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR)**

OLEH
AVREDO IVAN HESVIANTO
C100170090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 26 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H. M.Kn.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Oktober 2021

Penulis



AVREDO IVAN HESVIANTO

C100170090

PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR)

Abstrak

Mediasi di Pengadilan Agama, sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendamaikan suami istri yang ingin bercerai melalui pihak ketiga (Mediator). Tingginya angka perceraian dan bahkan hampir setiap tahunnya meningkat, sehingga menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan, untuk itulah perlu adanya mediasi, dalam proses mediasi, membutuhkan waktu yang panjang, yang menjadi pokok permasalahannya yaitu “ Bagaimana Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar”. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian yang mendeskripsikan peristiwa dan fakta hukum dalam kehidupan sosial. Populasi yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar yaitu berjumlah 6 orang Hakim Mediator yang sudah tersertifikasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan analisis data. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Karanganyar ialah bahwa mediasi bukanlah sekedar formalitas saja yang harus dilalui dalam proses perceraian, akan tetapi dalam proses mediasi, Hakim Mediator bersungguh-sungguh mengupayakan pihak yang bersengketa baik suami ataupun istri yang ingin bercerai untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui proses mediasi. Proses mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Kata Kunci: mediasi, perceraian.

Abstract

Mediation in the Religious Courts, as an effort made to suppress the high rate of divorce that occurs every year, with the aim of reconciling husband and wife who want to divorce through a third party (Mediator). The high divorce rate and even almost every year it increases, so that it becomes a very difficult problem to be resolved amicably, for this reason there is a need for mediation, in the mediation process, it takes a long time, which is the main problem, namely "How is the Mediation Process at the Karanganyar Religious Court " This study aims to determine how the divorce mediation process at the Karanganyar Religious Court. The method used is a descriptive approach with research methods that describe legal events and facts in social life. The population in the Karanganyar Religious Court is 6 certified Mediator Judges. This study uses data collection techniques using interviews, literature study, and data analysis. The results of the research that the author conducted at the Karanganyar Religious Court is that mediation is not just a formality that must be passed in the divorce process, but in the mediation process, the Mediator Judge earnestly seeks the disputing parties, both husband and wife who want to divorce, to be able to resolve the problem. they

face through the mediation process. The mediation process regulated in PERMA Number 1 of 2016 is about the mediation procedure in court.

Keywords: mediation, divorce.

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial sesama manusia itu terkadang menyebabkan sengketa diantara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik.

Dalam kehidupan berumah tangga sering kita jumpai pasangan suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusanya ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri.¹

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri, Namun islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam berumah tangga yang terkadang mengalami persengketaan dan percekcoakan yang berkepanjangan. Persengketaan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemadzorotan. Oleh karena itu Islam membuka jalan berupa jalan perceraian . Perceraian merupakan jallan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2011),235

Perceraian dalam islam memiliki proses yang sangat panjang, persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.²

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah tetapi diperbolehkan. Dalam Hadits Rasulullah SAW yang artinya: Dari Umar Dia bersabda Rasulullah bersabda “Sesuatu yang Halal tapi yang dibenci Allah adalah cerai” [H.R Abu Daud dan Hakim]. Menurut Ahmad Azhar Basir sebagaimana dikutip Abd Shomad, merumuskan “perkawinan adalah membuat akad atau kesepakatan untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan untuk melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, atas dasar kesukarelaan dan niat baik untuk mewujudkan kebahagiaan. kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. dan kedamaian dengan cara yang dikehendaki Allah”³

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi kenyataan bahwa sistem peradilan Indonesia tidak efektif dan tidak efektif. Fakta membuktikan bahwa penyelesaian kasus ini membutuhkan waktu yang lama dari tahap pertama (tahap banding) hingga tahap penarikan dan peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang mencari keadilan perlu menyelesaikan kasus dengan cepat dan tepat, bukan hanya masalah formal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip menjalankan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat 4 yang mengatur bahwa asas peradilan itu sederhana, cepat, dan berbiaya rendah.⁴

Kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Karanganyar cukup banyak. Untuk jumlah kasus perceraian di Karanganyar sepanjang 2020 sejak bulan Januari hingga bulan Oktober tercatat sudah 1.400 pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Angka Perceraian di Karanganyar kembali menunjukkan tren memprihatinkan. Dari 1.400 kasus itu, sebagian permohonan cerai diajukan oleh istri namun sebagian lainnya atasa perceraian gugatan talak

² Syahrizal Abbas, Mrdiasi dalam Hukum syariah, Hukum adat, Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2011), 180.

³ Abd Shomad, Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cet II (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 259.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang diajukan suami. Dalam jumlah kasus perceraian tersebut 1.110 diantaranya telah diputus oleh Pengadilan Agama Karanganyar. Sedangkan 290 kasus sisanya saat ini masih dalam proses persidangan. Angka perceraian di Karanganyar mengalami peningkatan hamper 30% yang dimana rata-rata usia perkawinan mereka yang mengajukan gugatan perceraian tersebut lima tahun ke atas.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai aktor kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memandang pentingnya mediasi yang terintegrasi di pengadilan.. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses perundingan untuk mediator. Adapun tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara demi terciptanya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama karanganyar, apakah proses penerapan mediasi tersebut sudah sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2016 ? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar ?

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah berfungsi sebagai solusi perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar. (2) Untuk mengetahui faktor penyebab tingkat kegagalan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar yang sudah menerapkan Pasal 130 HIR/154 RBg, serta PERMA No.1 Tahun 2016.

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan mampu menghasilkan paradigma baru serta dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin yang ingin meneliti penelitian yang hampir sama yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini.(2) Untuk menambah pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu

hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya dalam sistem peradilan perdata hukum islam.(3) Dan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama serta untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan peristiwa dan fakta hukum dalam kehidupan sosial. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan metode yang baik, jelas dan seakurat mungkin tentang data subjek penelitian. Dalam hal ini metode deskriptif akan mendeskripsikan penataan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar, dalam mepenerapan lembaga perdamaian sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016.

Di Pengadilan Agama Karanganyar, mengenai mediasi dalam perkara perceraian maupun semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek, dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta khususnya gugatan semuanya wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan hal lain berdasarkan PERMA ini. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Perma No.1 tahun 2016 mengenai jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam melakukan wawancara atau interview secara langsung pada tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 09:00 WIB, dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, bapak Drs. Mudara, M.Si terkait proses mediasi menjelaskan bahwa:

“Untuk Pengadilan Agama Karanganyar tentang mediasi khususnya perkara perceraian atau perkara-perkara yang masuk di Pengadilan yang khususnya gugatan, semuanya diadakan melalui proses mediasi karena hukumnya wajib kalo itu ndak dilakukan maka nanti putusan bisa batal demi hukum. Jadi untuk Pengadilan Agama Karanganyar sudah melaksanakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR”.

Jadi semua perkara yang masuk ke Pengadilan harus diadakan mediasi terlebih dahulu, apabila tidak melakukan mediasi terlebih dahulu maka putusan batal demi hukum. Kenapa bisa batal demi hukum? menurut ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (1) *“semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara, maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi”*. Selanjutnya mediasi dapat menghasilkan suatu kegagalan dan keberhasilan. Apabila mediasi gagal maka persidangan dapat dilanjutkan pada sidang selanjutnya yakni pembacaan surat gugatan, tetapi jika mediasi itu berhasil maka penggugat dapat mencabut gugatannya dan hasilnya adalah kedua pihak berhasil didamaikan.

Sedangkan dengan kelanjutan apabila proses mediasi kususnya dalam kasus perceraian tersebut berhasil, apakah dicabut nomor atas perkaranya dan dicatat didalam akta perdamaian Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Drs. Mudara, M.Si menyatakan bahwa :

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan di tandatangani oleh para pihak dan Mediator .*
- b. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.*
- c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.*
- d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dilakukan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dlam bentuk Akta*

Perdamian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Drs. Mudara M, Si juga menyatakan bahwa dalam proses mediasi terdapat 2 (dua) kesepakatan atau keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan mediasi :

a. Berhasil Penuh.

Berhasil penuh disini diartikan dimana para pihak yang bersengketa kusunya dalam hal kasus perceraian dengan adanya proses mediasi perdamaian ini para pihak tersebut bisa berdamai dan utuh menyatu kembali dalam kehidupan rumah tangga yang sebagai mana mestinya.

b. Berhasil Sebagian.

Makna dari berhasil sbagian itu sendiri yaitu dimana para pihak tetap cerai tidak dapat rukun kembali dalam kehidupan berumah tangga tetapi terdapat suatu kesepakatan antar pihak yang harus dilaksanakan mengenai hak atas asuh anak, harta gono-gini dan kesepakatan yang lainnya.

Pada proses pelaksanaa mediasi pihak-pihak yang bersengketa tersebut diperbolehkan untuk memilih mediator sendiri dari luar pengadilan. Syarat seorang mediator tersebut harus bersertifikat oleh lembaga pelatihan mediaor yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam bermediasi, seorang mediator harus mampu mengarahkan *skill* (ketrampilan) yang dimilikinya, agar suatu sengketa/perkara dapat ia kendalikan untuk menuntun pihak dalam mencapai suatu kesepakatan yang sehat.⁵ Merujuk pada surah An Nisa ayat 35, sebagaimana firman Allah:⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

⁵ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 89.

⁶ QS. An-Nissa’ (4) : ayat 35.

Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan, menurut pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum untuk mendapatkan kesepakatan yang sehat. Jadi, analisis penulis mengenai proses mediasi menurut Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah sesuai dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar.

3.2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar.

Dalam mengatasi permasalahan kemelud rumah tangga yang terjadi antara suami dengan istri yang sudah tidak terbendung lagi dan tidak bisa untuk di damaikan oleh para wali dari masing-masing keluarga, Islam menganjurkan untuk menempuh jalan terakhir dengan sebuah perceraian, walaupun demikian tetap dibenci oleh Allah SWT. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “ *talak* ” atau “ *furqah* ”. Adapun arti talak ialah; membuka ikatan dalam hal untuk membatalkan perjanjian. Sedangkan “ *furqah* ” artinya bercerai. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri.⁷ Perceraian terjadi apabila salah satu pihak suami atau istri ada yang meninggal (kematian). Adapula disebabkan karena kedua pasangan memang sudah tidak satu tujuan dalam suatu hubungan rumah tangga dan mengakibatkan perceraian yang dituntut dengan gugatan di Pengadilan.

Perselisihan diantara pasangan suami-isteri yang mengakibatkan kemudharatan dapat membuat rumahtangga menjadi tidak harmonis. Merujuk dalam surat An Nisa’ ayat 35 Allah SWT berfirman:

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 7.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٩٥﴾

Yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

Ayat diatas menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam baik dari kerabat, saudara maupun wali dari pasangan suami istri, apabila mengetahui adanya suatu pertengkaran, perselisihan, percekcoakan diantara mereka (suami-istri) tersebut yang menyebabkan perceraian, maka kita disuruh untuk mengutus seorang hakam/ juru penengah baik dari keluarga suami maupun isteri. Agar mereka dapat meredakan masalah, menetapkan serta menganalisa dari perselisihan yang terjadi dengan mengadakan perdamaian antara kedua pihak (suami-istri). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala urusan umatnya.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara secara langsung yang penulis lakukan pada tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 09:00 WIB, dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar: Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar oleh pasangan suami isteri, telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL

(Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain), dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, selain itu juga jumlah mediator di Pengadilan Agama Karanganyar dan mediator bersertifikat masih sedikit, jumlah mediator (Hakim Mediator) di Pengadilan Agama Karanganyar hanya 6 orang, dengan jumlah 6 orang ini tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar. Jumlah mediator ini juga bisa memengaruhi hasil mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berpekar yang tidak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kurang menguntungkan bagi mereka, Selain itu juga kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai adalah jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi, begitu juga dengan perkara bukan perceraian mereka merasa melalui persidanganlah yang terbaik dan ada rasa gengsi untuk berdamai di antara mereka.

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.

Di Pengadilan Agama Karanganyar yang diteliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Namun demikian, di pengadilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasi pun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan

mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.

Bapak hakim Drs. Mudara, S.Mi. juga menyatakan kegagalan mengenai proses perdamaian karena :

“Bahwa faktor kegagalan dalam mediasi. Seperti yang saya sampaikan bahwa penggugat dan tergugat diperintahkan hadir untuk mediasi, hal tersebut sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan. Faktor yang pertama yaitu dalam mediasi belum tentu para pihak itu tidak mau hadir, terutama tergugat. Kalo dalam proses mediasi ada salah satunya ndak hadir, itu ndak bisa di mediasi. Maka semuanya harus hadir untuk mediasi. Lha kalo penyebab kegagalan mediasi, mediasi itu kan dirukunkan. Hasil nya itu berhasil berarti penggugat mencabut perkaranya dan mereka rukun kembali itu namanya berhasil. Tetapi kalo kegagalan proses mediasi, biasanya orang yang ingin cerai sudah maju ke Pengadilan Agama itu memang sudah gak ada obat, sudah menempuh “hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha”. Maksudnya keluarga itu sudah berusaha mendamaikan dari pihak suami atau istri. Hampir mayoritas 99% orang ke Pengadilan itu para pihak sudah tidak sabar menahan sekian lama untuk bercerai, akhirnya meletus jalan terakhir baru ke Pengadilan.”

Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar yang sudah dijelaskan oleh bapak Drs. Mudara, M.Si. merupakan hal-hal yang penting untuk suatu proses perdamaian di ranah Pengadilan Agama. Dari mulai faktor ketidakhadiran salah satu pihak yang memang sudah tidak ingin bertemu dengan penggugat atau tergugat serta konflik yang terjadi sudah berlarut-larut, sehingga dari salah satu pihak tersebut tidak ingin lagi mendengar masukan-masukan dari mediator. Selain itu dalam urusan perkara perceraian di pengadilan, sebenarnya para pihak kesabarannya sudah maksimal, dari kedua belah pihak sudah diperintahkan untuk berdamai dirumah oleh wali masing-masing keluarga pihak, dan ternyata memang tidak berhasil untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut, seakan-akan sudah tidak bisa didamaikan atau rukun kembali, sehingga Pengadilan Agama adalah tujuan final. Kegagalan tidak melaksanakan proses mediasi biasanya salah satu pihak tidak hadir (*verstek*).

Dalam setiap sidang pasti ada mediasi/perdamaian dan hal itu wajib hukumnya. Dalam kesempatan Mediasi bisa dilakukan satu sampai tiga kali sidang, tetapi waktunya dibatasi. Setelah proses mediasi antara kedua pihak tidak bisa di damai berarti mediasi tersebut gagal. Selanjutnya pembuatan tuntutan atau gugatan dengan alasan permintaan dari penggugat itu. Di Pengadilan Agama Karanganyar yang paling banyak sang istri (penggugat) yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Perbandingan pasangan pihak istri dan suami yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Karanganyar sekitar 75% : 25% (tujuh puluh lima persen banding dua puluh lima persen) sehingga kebanyakan para pihak gagal untuk didamaikan ataupun menolak rukun kembali.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Implementasi mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar diawali dengan pendaftaran gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama, kemudian majelis hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama, penetapan hari sidang oleh Ketua majelis hakim, lalu pihak Pengadilan memanggil para pihak untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan pertama inilah, upaya mediasi dilakukan dengan dipilih salah satu mediator, lalu mediasi dilakukan selama 30 hari kerja dengan 1-2 kali pertemuan melakukan pemanggilan untuk setiap kali pertemuan mediasi. Tahap pertama mediator memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan mediasi, mempersilakan para pihak mengklarifikasi masalah yang dihadapi, selanjutnya mediator melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) jika terjadi keributan, selanjut Pertemuan mediasi berisi nasehat-nasehat oleh mediator mengarahkan para pihak untuk berunding mencapai kesepakatan damai. Akhirnya mediasi berakhir dengan hasil berhasil atau gagal yang akan diumumkan pada sidang selanjutnya. Menurut hasil penelitian penulis bahwa Pengadilan Agama Karanganyar dalam hal proses mediasi perceraian sudah menerapkan PERMA No.01 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian.

Kedua, Faktor yang menjadi penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar yaitu bahwa dalam hal kegagalan mediasi dari mulai faktor ketidakhadiran salah satu pihak yang memang sudah tidak ingin bertemu dengan penggugat atau tergugat serta konflik yang terjadi sudah berlarut-larut, sehingga dari salah satu pihak tersebut tidak ingin lagi mendengar masukan-masukan dari mediator. Selain itu dalam urusan perkara perceraian di pengadilan, sebenarnya para pihak kesabarannya sudah maksimal, dari kedua belah pihak sudah diperintahkan untuk berdamai di rumah oleh wali masing-masing keluarga pihak, dan ternyata memang tidak berhasil untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut, seakan-akan sudah tidak bisa didamaikan atau rukun kembali, sehingga Pengadilan Agama adalah tujuan final. Kegagalan tidak melaksanakan proses mediasi biasanya salah satu pihak tidak hadir (*verstek*).

Selain itu disamping faktor dari para pihak terkadang juga terdapat aspek faktor lain seperti kuasa hukum yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya. Keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator yang dimana jumlah mediator di Pengadilan Agama Karanganyar dan mediator bersertifikat masih sedikit, jumlah mediator (Hakim Mediator) di Pengadilan Agama Karanganyar hanya 6 orang, dengan jumlah 6 orang ini tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar.

Dalam setiap sidang pasti ada mediasi/perdamaian dan hal itu wajib hukumnya. Dalam melaksanakan mediasi pada kondisi covid 19 waktunya dibatasi 20-30 menit saja. Selain itu, pelaksanaan sidang mediasi pada tahun ini harus menggunakan protokol kesehatan (ProKes) sesuai aturan, yakni semua anggota di dalam ruang persidangan wajib mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki kantor Pengadilan, wajib mengenakan masker saat persidangan dimulai, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang terdekat baik majelis hakim dengan hakim anggota, kuasa hukum dengan para pihak penggugat dan tergugat sehingga membuat tidak efektifnya proses berjalannya mediasi tersebut.

4.2 Saran

Kepada para pihak, suami dan istri yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama seharusnya difikirkan matang matang lagi sebelum mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama, dikarenakan ada dampak untuk anak anak kalian nanti kedepannya. Dan apabila bisa di damaikan dan rukun kembali maka lakukanlah dengan semestinya untuk memperbaiki keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah.

Kepada masyarakat yang lain yang ingin melaksanakan pernikahan sebaiknya dipersiapkan dengan baik-baik, terutama dalam menghadapi rumah tangga harus sudah siap dan dewasa dalam mengambil kebijakan. Apabila ada perselisihan seharusnya dibicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu, kemudian juga dapat dibicarakan dengan orang tua keluarga masing-masing baik pihak istri maupun suami dan agar kedepannya semoga tidak ada penyesalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cet II* Jakarta: Kencana.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam, Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.